BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena ketenaga kerjaan di Indonesia sangat sering terjadi. Terkadang fenomena tersebut mengakibatkan banyak hal terjadi. Fenomena yang terjadi menyebabkan konflik dan jalan keluar. Namun saat ini lebih banyak dilihat konflik dibandingkan jalan keluar. Maka dari itu perlu adanya pengaturan-pengaturan lebih lanjut guna meminimalisir hal-hal tersebut terjadi. Indonesia dengan serius menangani hal ini dengan membuat UU No.13 tahun 2003. Undang-undang ini dikeluarkan guna menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing. Dibalik banyaknya fenomena yang terjadi, ada salah satu yang menarik perhatian yaitu K3L. K3L merupakan para pekerja yang bekerja mengurusi tentang K3L (kebersihan, keselamatan, kesehatan,).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri dalam jumlah yang besar. Besarnya jumlah tenaga kerja, tingginya jumlah pengangguran, serta minimnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia menjadi faktor pendukung peningkatan jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri. Hal ini menjadi alternatif bagi Indonesia untuk mengurangi persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di dalam

negeri. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini juga menjadi salah satu sumber devisa yang potensial bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.[1]

Fenomena pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri menunjukkan bahwa kesempatan kerja di luar negeri lebih banyak, menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di tahun 2006 ada 2,7 juta penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri secara resmi, yang menempati kira-kira 2,8 persen dari keseluruhan angkatan kerja di Indonesia. Sebagian besar dari TKI yang di luar negeri adalah perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau jasa pelayanan, mereka terpusat di Asia Tenggara, Asia Timur danTimur Tengah, khususnya di Malaysia.[2]

Pengertian Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), Tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen.

Hukum Ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur Tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenaga kerjaan awalnya dikenal dengan istilah perburuhan. Setelah kemerdekaan Indonesia ketenagakerjaan Indoneia

---

[1] Manullang Sendjun H, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) hal 67

[2] *Jurnal Administrasi Publik* (JAP),Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang Vol. 1, No. 4, Hal. 1

diatur dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 tahun 1969 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada tahun 1997 Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan. Keberadaan Undang-Undang No. 25 tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan ini menimbulkan berbagai protes dari masyarakat.

Hal ini dikaitkan dengan masalah menara jamsostek yang dibangun berdasarkan dugaan kolusi penyimpangan dana jamsostek. Keberadaan Undang-Undang No.25 tahun 1997 ini mengalami penangguhan dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 13 tahun 2003)[3]

Selain Undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan disebutkan juga pada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 Negara RI. Perihal isi ketentuan dalam batang tubuh yang ada relevansinya dengan masalah ketenagakerjaan, terutama terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa: “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.Tenaga kerja adalah tulang punggung dalam peningkatan pembangunan pada umumnya, pertumbuhan industri pada khususnya. Oleh karenanya seluruh kegiatan

[3] Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika. hlm 2

yang dilakukan tenaga kerja akan mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum dan hubungan antar/intern organisasi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[4]

Kesejahteraan merupakan dambaan setiap manusia dalam hidupnya. Kesejahteraan dapat dikatan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan manusia dari kebutuhan yang bersifat paling dasar, seperti makan, minum, dan pakaian hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu hal mendasar yang mampu membuat manusia merasakan kesejahteraan.

Adam Smith telah mengemukakan bahwa kesejahteraan dapat diraih dengan adanya pembagian kerja pada tugas tertentu, angtar sektor, atau antar negara. Konsep kesejahteraan Smith identik dengan pemenuhan kebutuhan melalui kegiatan produksi yang mengarah pada industri dengan adanya pembagian kerja antara pengusaha sebagai pemilik modal, pemerintah sebagai pemberi fasilitas industri, dan buruh sebagai salah satu faktor produksi. Pihak industri atau pengusaha sebagai pemilik modal harus selalu menjaga kualitas maupun kuantitas produksi agar mampu memenuhi target persaingan pasar global.

Untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat, Pemerintah telah membuat program KUR TKI. KUR TKI adalah suatu bentuk bantuan

[4] Sendjun H. Manulang, 1995, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

permodalan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai modal awal dalam sejaran perjalanannya menuju negeri tujuan. Dalam hal ini pemerinta melalui jalur APBN telah menjalankan struktur dengan pemerataan alokasi, stabilisasi dan distribusinya agar bantuan modal ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil dan diterima dalam bentuk nyata. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan membantu Kementerian ketenagakerjaan memberikan pelatihan kewirausahaan agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).[5]

Di Indonesia telah memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah, ataupun oleh organisasi non pemerintah. Program tersebut bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat dan meningkatkanya kesejahteraan masyarakat. Salah satu programnya merupakan Koperasi. Koperasi merupakan salah satu dari badan usaha di Indonesia yang dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat.[6]

Jumlah koperasi yang ada di Indonesia mengalami peningkatan, pada tahun 2014. Hal ini berdampak pada semakin aktifnya partisipasi anggota di dalam kegiatan koperasi. Di wilayah Indonesia bagian timur yang menduduki jumlah koperasi terbanyak adalah provinsi Jawa Timur.

---

[5] https://www.google.com/amp/s/www.simulasikredit.com/amp/apa-itu-kredit-usaha-rakyat-kur-kur-mikro-kur-retail-kur-tki/ , diakses pada 15 Desember 2019

[6] Subrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hal 125

Jawa Timur telah menduduki peringkat pertama yang mempunyai jumlah koperasi aktif terbanyak selama 5 tahun berturut-turut.[7]

Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang sangat pesat, peningkatan tersebut menjelaskan bahwa koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini juga mendorong masyarakat di wilayah Jawa Timur yang masih hidup di pedesaan dan perekonomianya yang belum tertata dengan baik. Oleh karena itu, dengan banyaknya jumlah koperasi di Jawa Timur diharapkan membantu mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut dengan kegiatan yang ada di koperasi. Salah satu wilayah di Jawa Timur saat ini yang sedang mengalami perkembangan dibidaang Koperasi Serba Usaha ialah Kabupaten Tulungagung yang menjadi objek penelitian. Koperasi Serba Usaha ini di Kabupaten Tulungagung merupakan koperasi terbesar dan menempati urutan ke-tiga di Jawa Timur. Perkembangan Koperasi Serba Usaha di kabupaten Tulungagung berdasarkan data BPS Tulungagung pada tahun 2017 dapat dilihat dibawah ini[8] :

[7]BPS Provinsi, "Perkembangan Koperasi di Provinsi Tahun 2011 – 2015", diakses pada 31 Agustus 2019. 0www.bps.go.id/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi-20

[8] BPS Tulungagung," Perkembangan Koperasi Menurut Kecamata0n Tahun 2017", diaksespada 31 Agustus 2019. https:/tulungagung.bps.go.id/statictable/2019/0jumlah-koperasimenurutkecamatan-dan-jenisnya-di-kabupaten-tulungagung-2017.html

Tabel 1.1
Perkembangan KSU
Berdasarkan Kecamatan tahun 2017

Kecamatan	**Serba Usaha**	**Simpan Pinjam**	**Wreda tama**
Besuki	3	0	0
Bandung	9	1	1
Pakel	5	0	0
Campurdarat	4	0	0
Tanggunggunung	0	0	0
Kalidawir	7	0	0
Pucanglaban	1	0	0
Rejotangan	9	1	1
Ngunut	14	1	0
Sumbergempol	7	0	0
Boyolangu	12	3	6
Tulungagung	22	15	1
Kedungwaru	10	4	0
Ngantru	7	1	0
Karangrejo	1	1	0
Kauman	0	1	1
Gondang	7	0	0
Pagerwojo	3	0	0
Sendang	5	0	0
Jumlah	126	28	10

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kab Tulungagung

Di lihat dari tabel di atas, bahwa jumlah Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2017 sebanyak 126 unit KSU yang tersebar di 19 Kecamatan, salah satunya ialah Koperasi Serba Usaha Malindo Artha yang terletak di Jalan Raya Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Wilayah kerja Koperasi Serba Usaha Malindo Artha meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kalidawir. Koperasi Serba Usaha Malindo Artha merupakan lembaga ekonomi yang salah satu kegiatanya koperasi simpan pinjam yang mempunyai tujuan dengan cara meminjamkan modal ke masyarakat yang ekonominya masih menengah ke bawah.

Salah satu program Koperasi Malindo Artha adalah pembiayaan TKI. TKI berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, salah satu pengirim TKI terbesar berasal dari daerah Tulungagung. Secara historis, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) dari kabupaten Tulungagung ke luar negeri dimulai awal dekade 1980-an, seiring dengan usaha pemerintah untuk mendorong pengiriman TKI sejak tahun 1979. Kabupaten Tulungagung - bersama Blitar, Kediri dan Madiun dikenal sebagai daerah pelopor pengirim migran ke luar negeri di provinsi Jawa Timur[9]

Tujuan TKI Tulungagung awalnya ke Malaysia, namun mulai tahun 2000-an semakin berkembang ke negara-negara Asia lainnya seperti

[9] Haning Romdiati, *Migrasi Tenaga Kerja Indonesia Dari Kabupaten Tulungagung : Kecenderungan Dan Arah Migrasi, Serta Remitansi*, Vol 7 No.2, (Jurnal Kependudukan Indonesia, 2012)

Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea dan lainnya. Berikut data penempatan TKI dari Tulungagung pada tahun 2016-2018 [10]

Tabel 1.2
Penempatan TKI dari Tulungagung

Kab-Kota	2016	2017	2018	Selisih 2017 &2018
	Jan- Sep	Jan- Sep	Jan- Sep	-100
Blitar	3.544	6.310	6.210	100
Kediri	1.830	2.686	2.782.	293
Tulungagung	3.430	4.571	4.864	

Sumber:BNP2TKI, 2018

Dari data tersebut, jumlah penempatan TKI dari Tulungagung setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 penempatan TKI berjumlah 3.430 TKI dan meningkat menjadi 4.571 TKI di tahun 2017. Sementara itu, kenaikan sebesar 293 menjadikan total penempatan TKI di tahun 2018 sebesar 4.864 TKI.

Alasan peneliti ingin mengambil judul ini karena Koperasi Serba Usaha Malindo Artha termasuk salah satu Koperasi Serba Usaha yang maju di Kabupaten Tulungagung yang memiliki berbagai jenis program yang dikelolanya, salah satunya yaitu pembiayaan tenaga kerja Indonesia.

[10] www.BNP2TKI.go.id, diakses pada tanggal 15 Desember 2019

Dengan program program yang ada Koperasi Serba Usaha Malindo Artha diharapkan akan mampu mendrong perekonomian masyarakat di Kalidawir.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sejauh mana kontribusi Koperasi Serba Usaha Malindo Artha bagi masyarakat di Kalidawir. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **"Kontribusi Koperasi Serba Usaha Malindo Artha dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalaui porgram Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia pada Koperasi Malindo Artha di Kalidawir Tulungagung (Perspektif Ekonomi Islam).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi Koperasi Serba Usaha Malindo Artha melalui program pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia di Kalidawir Tulungagung ?
2. Bagaimana dampak program pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalidawir Tulungagung ?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam program pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalidawir Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan kontribusi Koperasi Serba Usaha Malindo Artha melalui program pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia di Kalidawir Tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan dampak program pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalidawir Tulungagung
3. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi dalam program pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalidawir Tulungagung

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengidentifikasian program yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Malindo Artha
2. Pengidentifikasian kesejahteraan masyarakat setelah mendapatkan kontribusi dari Koperasi Serba Usaha Malindo Artha melalui programnya.

3. Pengidentifikasian dampak Koperasi Serba Usaha Malindo Artha Melalui program pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalidawir Tulungagung.
4. Melihat identifikasi masalah yang ada, maka peneliti membatasi masalah agar tidak meluas pokok permasalahan yang telah ada dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka akan diberikan pembatasan yaitu kontribusi Koperasi Serba Usaha Malindo Artha Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia pada Koperasi Malindo Artha di Kalidawir Tulungagung ditinjau dari aspek ekonomi saja.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan baik secara teoretis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoretis

   Kontribusi koperasi dalam perekonomianya sangat besar, salah satunya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Koperasi sangat berperan dalam mencakupi kebutuhan usaha di masyarakat.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi lembaga, dengan adanya penelitian ini agar pihak Koperasi Serba Usaha Malindo Artha dapat dijadikan evaluasi untuk memperbaiki kinerja.

b. Untuk peneliti, dengan adanya penelitian ini maka dapat mempelajari secara mendalam, serta dapat mempraktikkan secara langsung mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Malindo Artha khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Untuk masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar memberikan tambahan ilmu dan sebagai bahan referensi

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat. Penegasan istilah ini bertujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran agar di dapatkan kesamaan pemahaman. Penegasan istilah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

   a. Kontribusi menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan, dan lain sebagainya.[11]

   b. Koperasi Serba Usaha (KSU) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksim konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang

[11] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), hal 269

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.[12]

c. Kesejahteraan Masyarakat menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup kayak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. [13]

d. Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiir maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.[14]

e. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan warga Negara Indonesia yang berkerja di Luar Negeri untuk memenuhi kebutuhanya dengan jumlah waktu tertentu.[15]

f. Perspektif Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam rangka mencari penghidupan individu maupun kelompok sesuai dengan ajaran islam (Al-Qur'an dan Al- Hadist) [16]

---

[12] Rudianto, *Manajemen Koperasi,* (Bandung : Alfabeta,2010) hal 26
[13] Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat.
[14] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta : Ekonisia, 2005) hal 260
[15] Koentrojoningrat, *pengantar Ilmu Antropologi*, hal 146
[16] Ilfi Nur Diana, Hadist-hadist Ekonom (Malang: UIN Maliki Press,2008) hal 133

2. Definisi Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan “kontribusi koperasi serba usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaluin program pembiayaan tenaga kerja Indonesia pada koperasi Malindo Artha di Kalidawir Tulungagung (Perspektif Ekonomi Islam)” ini merupakan kajian mengenai adanya kontribusi atau peran dari Koperasi serba usaha melalui program pembiayaan tenaga kerja Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dianalisis mengenai kontribusi koperasi serba usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembiayaanya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini agar lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini pertama ini akan dijelaskan gambaran singkat apa yang akan di bahas dalam skripsi, yang mencakup : latar belakang masalah yang berisi tentang fenomena – fenomena

yang terkait dengan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan. Pada bab ini peneliti menggambarkan tentang keadaan dari berbagai hal mengapa skripsi ini dibuat dengan judul tersebut dan mengidentifikasi dan pembatasan masalahnya serta fokus penelitian, tujuan dilakukan penelitian serta kegunaan penelitian dan penegasan istilah dan hal apa yang akan ada dalam skripsi ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian teori yang digunakan dalam melakukan penelitian kajian teori ini berisi tentang makro ekonomi, kontribusi, koperasi serba usaha, kesejahteraan masyarakat, pembiayaan tenaga kerja Indonesia, penelitian terdahulu, kerangka berfikir penelitian. Kaitanya bab kedua ini dengan bab pertama yaitu pada bab ini menjelaskan mengenai teori dari berbagai variabel yang tercantum dalam judul sehingga dapat menjadi acuan untuk bab selanjutnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat rancangan penelitian berisi jenis

dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang paparan data-data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, melalui pertanyaa-pertanyaan atau wawancara. Sehinga dalam bab ini merupakan penyajian paparan data dari lapangan yang telah disusun rupa, dan juga penulis akan memberikan pemaparan atau analisis mengenai hasil temuan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yaitu kontribusi koperasi serba usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembiayan tenaga kerja Indonesia pada koperasi Malindo Artha di Kalidawir Tulungagung. Dan juga kaitanya dengan latar belakang maupun fokus penelitian dan teori yang ada.

BAB VI : PENUTUP

Dalam penutup meliputi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaian. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.